



**EFEKTIVITAS PENGEMBANGAN USAHA MINA PEDESAAN (PUMP)
DALAM PENANGGULANGAN KEMISKINAN BAGI MASYARAKAT
NELAYAN DI KOTA SIBOLGA**

Afriando Hutabarat¹, Syafrizal²

Jurusan Ilmu Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik,
Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, Indonesia
Email : Afriandohutabarat@gmail.com

Abstract

The problem of fishermen's poverty is a multi-dimensional problem so that to solve it, a comprehensive solution is needed, and not a partial solution. Sibolga City where most of the people's livelihoods are fishermen, this also shows that Sibolga City is one of the coastal areas where there is a fairly high poverty rate. The Capture Fisheries PUMP focuses on target groups that have been started in 2011 through coaching small-scale fishermen who are members of joint business groups. The existence of a Joint Business Group (KUB) by PUMP which was formed by civil servant extension workers from the Maritime Affairs, Fisheries and Livestock Services of Sibolga City and also contracted fishery extension workers (PPTK) from the ministry of marine and fisheries became a forum for fishing communities to prosper themselves. The method used in this research is descriptive qualitative analysis, and data collection through interviews. This study aims to determine the effectiveness of Mina Rural Business Development in the Capture Fisheries Sector in Sibolga City. The results showed that the effectiveness of Mina Rural Business Development in the Capture Fisheries Sector (PUMP-PT) in Sibolga City can be said to have not been effective in tackling poverty in the fishing community in Sibolga City due to the inability of community human resources in managing the assistance provided by the government.

Keywords: Effectiveness, MINA business development, Poverty

Abstrak

Masalah kemiskinan nelayan merupakan masalah yang bersifat multi dimensi sehingga untuk menyelesaikannya di perlukan solusi yang menyeluruh, dan bukan solusi secara parsial. Kota Sibolga yang sebagian besar mata pencaharian masyarakatnya adalah sebagai nelayan, hal ini juga menunjukkan bahwa Kota Sibolga menjadi salah satu kawasan pesisir pantai yang terdapat angka kemiskinan yang cukup tinggi. PUMP Perikanan Tangkap fokus pada kelompok sasaran yang sudah di mulai tahun 2011 melalui pembinaan nelayan skala kecil yang tergabung dalam kelompok usaha bersama. Adanya Kelompok Usaha Bersama (KUB) oleh PUMP yang di bentuk oleh penyuluh PNS dari Dinas Kelautan, Perikanan dan Peternakan Kota Sibolga dan juga penyuluh perikanan tenaga kontrak (PPTK) dari kementerian kelautan dan perikanan menjadi satu

wadah bagi masyarakat nelayan dalam mensejahterakan diri. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah Deskriptif analisis kualitatif, dan pengumpulan data melalui wawancara. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui efektivitas Pengembangan Usaha Mina Pedesaan Bidang Perikanan Tangkap di Kota Sibolga. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Efektivitas Pengembangan Usaha Mina Pedesaan Bidang Perikanan Tangkap (PUMP-PT) di Kota Sibolga dapat dikatakan belum efektif dalam menanggulangi kemiskinan masyarakat nelayan di Kota Sibolga karena ketidakmampuan SDM masyarakat dalam mengelola bantuan yang di berikan pemerintah.

Kata Kunci : Efektivitas, pengembangan usaha MINA, Kemiskinan

PENDAHULUAN

Pengentasan kemiskinan di wilayah pesisir dan sentra-sentra perikanan merupakan salah satu kegiatan strategis dalam pelaksanaan pembangunan kelautan dan kemiskinan. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) tahun 2013, jumlah penduduk miskin mencapai 28,07 juta orang, dimana 25,14 persen diperkirakan tinggal di wilayah pesisir. Kemiskinan masih selalu saja masalah yang sangat sering dialami oleh setiap daerah khususnya daerah pesisir yang mayoritas mata pencaharian penduduknya adalah nelayan. Dengan demikian masalah kemiskinan adalah masalah yang menjadi prioritas utama dalam pelaksanaan pembangunan di daerah pesisir khususnya pembangunan kelautan dan perikanan.

Sesuai dengan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 10 Tahun 2014 menjelaskan bahwa permasalahan yang mendasar yang dihadapi masyarakat kelautan dan perikanan adalah kurangnya akses terhadap permodalan, pasar dan teknologi, perlindungan sosial budaya, tidak memiliki asset sebagai modal aktif, menurunnya kualitas lingkungan, serta lemahnya kelembagaan masyarakat. Sektor kelautan dan perikanan merupakan salah satu sektor ekonomi yang memiliki peranan penting dalam pembangunan ekonomi nasional, khususnya dalam penyediaan bahan pangan protein, perolehan devisa dan penyediaan lapangan kerja. Pada saat krisis ekonomi, peranan sektor perikanan sangat signifikan, terutama dalam hal mendatangkan devisa.

Terdapat beberapa aspek yang menyebabkan terpeliharanya kemiskinan nelayan atau masyarakat pinggiran pantai, diantaranya kebijakan pemerintah yang tidak memihak masyarakat miskin, banyak kebijakan terkait penanggulangan kemiskinan bersifat *top down* dan selalu menjadikan masyarakat menjadi objek, bukan subjek. Kondisi bergantung pada musim sangat berpengaruh pada tingkat kesejahteraan nelayan, terkadang beberapa pekan nelayan tidak melaut dikarenakan musim yang tidak menentu. Rendahnya sumber daya manusia (SDM) dan peralatan

yang di gunakan nelayan berpengaruh pada cara menangkap ikan, keterbatasan pemahaman akan teknologi, menjadikan kualitas dan kuantitas tangkapan tidak mengalami perbaikan.

Berbagai kegagalan yang di alami oleh kebijakan-kebijakan penanggulangan kemiskinan yang di ambil oleh pemerintahan menunjukkan bahwa, masalah kemiskinan bukan lah hal yang sederhana, tetapi suatu fenomena yang memiliki variabilitas dimensi yang sangat kompleks. Salah satunya Kota Sibolga, berdasarkan pengamatan sederhana bahwa permasalahan kemiskinan cenderung terdominasi dan terkonsentrasi pada wilayah-wilayah pesisir pantai. Masyarakat miskin pesisir tersebut mempunyai mata pencaharian utama sebagai nelayan, sehingga mempunyai kajian yang mendalam tentang apa yang harus di tempuh untuk penanggulangannya. Sejalan dengan Misi Kementerian Kelautan dan Perikanan Tahun 2010-2014, yaitu “Mensejahterakan Masyarakat Kelautan dan Perikanan”, maka salah satu strategi untuk mencapai misi tersebut dilaksanakan melalui Program Pengembangan Usaha Mina Pedesaan (PUMP). Kegiatan ini dilaksanakan karena dilatarbelakangi oleh kondisi sosial ekonomi masyarakat pesisir pantai yang pada umumnya bermata pencaharian nelayan tradisional atau dapat digolongkan kepada masyarakat miskin.

Untuk itu jika ditinjau dari pelaksanaan Program Pengembangan Usaha Mina Pedesaan (PUMP) terkhususnya pelaksanaan pada Bidang Perikanan Tangkap atau disebut dengan PUMP-PT, masih banyak terdapat masalah kemiskinan yang dihadapi oleh masyarakat nelayan di Kota Sibolga.

TINJAUAN PUSTAKA

1. Pengertian Efektivitas

Dalam pelaksanaan kerja selalu memakai lima macam sumber usaha. Yaitu pikiran, tenaga, waktu, uang dan benda. Walaupun dalam gabungan yang berbeda untuk masing-masing jenis pekerjaan, namun pada umumnya setiap orang dalam melakukan kegiatan tertentu menginginkan suatu hal yang maksimal. Kegiatan yang dilaksanakan sesuai proses dan waktu yang ditentukan maka dapat menghasilkan kebijakan yang baik dan inilah yang di sebut dengan efektivitas. Suamaryadi (2005) mengatakan bahwa efektivitas dalam organisasi dapat dirumuskan sebagai tingkat perwujudan sasaran yang menunjukkan sejauh mana sasaran telah dicapai. Sedangkan, Gie (2007) juga mengatakan bahwa efektivitas mengandung arti terjadinya efek atau akibat yang di kehendaki. Jadi, perbuatan seseorang yang efektif ialah perbuatan yang menimbulkan akibat sebagaimana di kehendaki oleh orang itu.

Menurut Gie (2000), efektivitas kerja adalah suatu keadaan yang mengandung pengertian mengenai terjadinya suatu efek atau kehendak kalau seseorang melakukan perbuatan dengan maksud tertentu, sebagaimana yang di kehendaknya. Efektivitas kerja adalah suatu kegiatan-kegiatan dalam organisasi baik itu organisasi pemerintah atau swasta, orientasi pemikirannya dan pelaksanaannya selalu dikaitkan dengan efisiensi dan efektivitas, artinya bagaimana agar kegiatan organisasi dalam mencapai tujuan dengan baik tanpa terjadinya pemborosan.

A. Pengembangan Usaha Mina Pedesaan Bidang Perikanan Tangkap (PUMP-PT)

Untuk meningkatkan efektivitas upaya penanggulangan kemiskinan presiden telah mengeluarkan perpres No.15 tahun 2010 tentang percepatan penanggulangan kemiskinan yang bertujuan untuk mempercepat penurunan angka kemiskinan hingga 8 sampai 10 persen pada akhir 2014. Pada program penanggulangan kemiskinan bersasaran klaster II kelompok kedua adalah program-program kemiskinan yang sarasannya adalah komunitas. Program penanggulangan kemiskinan bersasaran komunitas dalam pelaksanaannya menggunakan prinsip pemberdayaan masyarakat. Contoh program ini adalah Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri.

Pengembangan Usaha Mina Pedesaan adalah konsepsi pembangunan ekonomi kelautan perikanan berbasis kawasan berdasarkan prinsip-prinsip terintegritas, efisien, berkualitas dan percepatan. Pengembangan Usaha Mina Pedesaan ini juga dicirikan dengan kawasan perikanan yang tumbuh dan berkembangnya karena berjalannya sistem dan usaha mina bisnis yang diharapkan dapat melayani dan mendorong kegiatan-kegiatan pembangunan perikanan (minabisnis). Sesuai dengan peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan No.10 tahun 2014, Pengembangan Usaha Mina Pedesaan yang selanjutnya di sebut PUMP adalah bagian dari pelaksanaan PNPM KP melalui bantuan pengembangan usaha dalam menumbuh kembangkan usaha perikanan sesuai potensi desa.

PNPM Mandiri KP adalah program pemberdayaan masyarakat yang ditujukan untuk meningkatkan kemampuan dan pendapatan, penumbuh kembangan wirausaha kelautan dan perikanan serta meningkatnya kualitas lingkungan, program nasional dalam wujud kerangka kebijakan sebagai dasar dan acuan pelaksanaan program-program penanggulangan kemiskinan berbasis pemberdayaan masyarakat. PNPM Mandiri KP dilaksanakan melalui harmonisasi dan pengembangan sistem serta mekanisme dan prosedur program, penyediaan pendampingan dan

pendanaan stimulant untuk mendorong prakarsa dan inovasi masyarakat dalam upaya penanggulangan kemiskinan yang berkelanjutan.

Sesuai visi kementerian kelautan dan perikanan Tahun 2010-2014, yaitu “Pembangunan Kelautan dan Perikanan yang Berdaya Saing Berkelanjutan untuk Kesejahteraan Masyarakat”.

Untuk mewujudkan misi tersebut maka misi yang diemban adalah :

- a. Mengoptimalkan pemanfaatan sumber daya kelautan dan perikanan.
- b. Meningkatkan nilai tambah dan daya saing produk kelautan dan perikanan, dan
- c. Memelihara daya dukung dan kualitas lingkungan sumber daya kelautan dan perikanan

Salah satu strategi untuk mencapai visi dan misi tersebut dilaksanakan melalui pemberdayaan dan kewirausahaan. Kegiatan pemberdayaan masyarakat pada lingkup kementerian kelautan dan perikanan dilaksanakan melalui Progran Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri kelautan dan Perikanan yang terdiri dari Pengembangan Usaha Mina Pedesaan (PUMP-PT) Perikanan Tangkap, Perikanan Budidaya, Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan.

B. Kemiskinan

Syaifuddin (2007) membagi cara berfikir yang memandang kemiskinan sebagai gejala absolute dan sebagai gejala relative. Cara berfikir (model) mengenai kemiskinan sebagai gejala absolut memandang kemiskinan bahkan tidak memiliki sarana untuk mendukung kehidupan sendiri. Cara pandang relativistic ini terdiri atas dua cara pandang (model) kebudayaan, cara pandang (model) struktural. Menurut Sarasutha dan Noor dalam Supadi dan Achmad Rozany (2008) kemiskinan secara konseptual dapat di bedakan atas tiga pengertian , yaitu kemiskinan subyektif, kemiskinan absolut dan kemiskinan relatif.

1. pengertian kemiskinan subyektif

Setiap orang mendasarkan pemikirannya sendiri dengan menyatakan bahwa kebutuhannya tidak terpenuhi secara cukup walaupun secara absolut atau relatif sebenarnya orang itu tidak tergolong miskin.

2. Pengertian kemiskinan absolut

Kondisi dimana seseorang atau keluarga memiliki pendapat tetapi tidak mencukupi untuk kebutuhan minumannya sehari-hari secara efisien. Pengertian kemiskinan relatif berkaitan dengan konsep relatif deprivation dimana kemampuan pemenuhan kebutuhan seseorang atau keluarga

berada dalam posisi relatif terhadap anggota masyarakat lain yang tinggal dalam suatu wilayah. Konsep ini terkait erat dengan ketimpangan pendapatan.

3. Pengertian kemiskinan relatif

Pengertian kemiskinan absolut lebih banyak di gunakan oleh pemerintahan dalam upaya penanggulangan kemiskinan pada berbagai sektor pelayanan publik, misalnya di bidang pangan, kesehatan, pendidikan dan perumahan. Penggunaan defenisi kemiskinan absolut dalam perencanaan penanggulangan kemiskinan yang di tetapkan oleh pemerintahan adalah karena defenisi dan pendekatan yang tersebut dapat digunakan untuk menilai dari efek kebijakan anti kemiskinan antar waktu atau perkiraan dampak suatu proyek terhadap kemiskinan.

C. Masyarakat Nelayan

Masyarakat nelayan merupakan paduan dari dua kata masyarakat dan nelayan, berikut pengertian dari masing-masing kata tersebut :

1. Pengertian Masyarakat

Pengertian masyarakat yang dalam istilah bahasa inggris di sebut Society (berasal dari kata latin, socius yang berarti “kawan”). Masyarakat sendiri berasal dari akar kata Arab syaraka yang artinya ikut serta atau berperan serta. Jadi masyarakat adalah kumpulan manusia yang saling berinteraksi satu sama lainnya.

Sejalan dengan pendapat di atas menurut Koentjaraningrat dalam “ ilmu sosial dasar” masyarakat adalah kelompok manusia yang saling berinteraksi yang memiliki prasarana untuk kegiatan tersebut dan adanya saling keterkaitan untuk mencapai tujuan bersama. Masyarakat adalah tempat kita bisa melihat dengan jelas proyeksi individu sebagai (*input*) bagi keluarga, keluarga sebagai tempat prosesnya, dan masyarakat adalah tempat kita melihat hasil (*output*) dari proyeksi tersebut.

2. Pengertian Nelayan

Nelayan di dalam Ensiklopedia Indonesia di golongankan sebagai pekerja, yaitu orang-orang yang secara aktif melakukan kegiatan menangkap ikan, baik secara langsung maupun tidak langsung sebagai mata pencahariannya. Dalam kamus besar Indonesia pengertian nelayan adalah orang yang mata pencaharian utama dan usaha menangkap ikan di laut.

3. Penggolongan Nelayan

Nelayan bukanlah suatu entitas tunggal, mereka terdiri dari beberapa dari beberapa kelompok. Dilihat dari segi pemilikan alat tangkap, nelayan dapat dibedakan menjadi tiga kelompok, yaitu :

- a) Nelayan Buruh, adalah nelayan yang bekerja dengan alat tangkap milik orang lain.
- b) Nelayan juragan, adalah nelayan yang memiliki alat tangkap yang dioperasikan oleh orang lain
- c) Nelayan perorangan, adalah nelayan yang memiliki peralatan tangkap sendiri, dan dalam pengoperasiannya tidak melibatkan orang lain.

METODE

A. Jenis Penelitian

Adapun metode yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif dengan analisis kualitatif, yaitu prosedur pemecahan masalah yang diselidiki dengan menggambarkan, melukiskan keadaan objek penelitian pada saat sekarang berdasarkan fakta-fakta yang tampak atau sebagaimana adanya. Sugiyono (2011) mengatakan bahwa secara teoritis penelitian kualitatif merupakan penelitian yang menggunakan diri sendiri (penelitian) sebagai instrument penelitian. Dalam pelaksanaan penelitian akan mengikuti asumsi-asumsi cultural sekaligus mengikuti data, dalam mencapai wawasan-wawasan imajinatif kedalam dunia sosial informasi, dimana peneliti diharapkan fleksibel dan relatif tetapi tetap mampu mengatur jarak. Creswell (2010) mengemukakan bahwa penelitian kualitatif merupakan metode-metode untuk mengeksplorasi dan memahami makna yang oleh sejumlah individu dan kelompok orang dianggap berasal dari masalah social atau kemanusiaan. Proses penelitian kualitatif ini melibatkan upaya-upaya peting, seperti mengajukan pertanyaan-pertanyaan dan prosedur-prosedur, mengumpulkan data yang spesifik, menganalisis data secara induktif mulai dari tema-tema yang khusus ke tema-tema yang umum, dan menafsirkan makna data. Penelitian ini akan membahas efektivitas pengembangan usaha mina pedesaan (PUMP) dalam penanggulangan kemiskinan bagi masyarakat nelayan di kota sibolga.

PEMBAHASAN

Penentuan efektivitas program PUMP-PT di tentukan berdasarkan tercapainya ketiga tujuan program PUMP-PT yaitu sebagai berikut :

1. Meningkatkan pendapatan nelayan melalui kegiatan pengembangan usaha nelayan kecil di pedesaan
2. Menumbuhkembangkan kewirausahaan nelayan di pedesaan
3. Meningkatkan fungsi kelembagaan ekonomi nelayan menjadi mitra lembaga keuangan dalam rangka akses permodalan

Pelaksanaan PUMP diselaraskan dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJM) dan Rencana Strategis (RENSTRA) Kementerian Kelautan dan Perikanan. Sasaran utama program PUMP-PT ini adalah dengan terbentuknya Kelompok Usaha Bersama (KUBE). KUBE adalah badan usaha non badan hukum ataupun yang sudah berbadan hukum berupa kelompok yang dibentuk oleh nelayan berdasarkan hasil kesepakatan atau musyawarah seluruh anggota yang dilandasi keinginan bersama untuk bersaha bersama dan di pertanggung jawabkan secara bersama guna meningkatkan pendapatan anggota. Kelompok ini nantinya akan menjadi wadah atau tempat untuk mengembangkan tujuan dari program ini. Kelompok seoerti ini pun sudah ada sejak adanya bantuan dari PNPM Kelautan dan Perikanan, sehingga KUBE ini dapat dikatakan sebagai kelanjutan dari kelompok sebelumnya.

Hasil penelitian mendapati bahwa program PUMP-PT kurang efektif, hal ini dikarenakan tujuan program PUMP-PT yang tidak dapat tercapai dengan baik. Yang mana pendapatan nelayan masih saja belum bisa meningkat dengan baik pada Tahun 2012. Tujuan kedua yaitu menumbuhkembangkan kewirausahaan nelayan dapat di simpulkan kurang baik karena ada beberapa dari kelompok setelah mendapatkan bantuan BLM mereka tidak mampu mengelolanya dengan baik dan malah menjual alat-alat tangkap ikan dan yang mana uang hasil penjualan alat tangkap mereka pergunakan untuk keperluan pribadi mereka yang bersifat komersil. Tujuan program yang ketiga yakni meningkatkan fungsi kelembagaan KUB sebagai mitra lembaga keuangan, tidak tercapai.

Berikut hasil penilaian dari ketiga indikator keefektifan program PUMP-PT, yaitu

1. Pendapatan

Usaha perikanan tangkap di Kota Sibolga merupakan sumber pendapatan utama bagi masyarakat nelayan, di samping sumber pendapatan lain seperti buruh petani, buruh, ataupun pedagang. Usaha perikanan tangkap ini di dominasi nelayan tradisional, yang dicirikan oleh teknologi sederhana, sangat di pengaruhi oleh musim dan hasil produksi/tangkapan sudah mencukupi untuk konsumsi lokal. Penyaluran dana BLM PUMP-PT telah digunakan sepenuhnya

untuk keperluan pembelian mesin, perbaikan perahu, pembelian jaring tangkap dan keperluan penangkapan ikan, sehingga mengakibatkan produktivitas nelayan menjadi lebih besar, sebab nelayan sudah memiliki sarana yang dibutuhkan agar lebih mampu memperluas jangkauan area tangkapan. Peningkatan produktivitas berakibatkan pendapatan nelayan juga turut meningkat. Dan hambatan yang sangat mempengaruhi hasil pendapatan nelayan berada pada faktor alam yaitu cuaca yang tidak mendukung di laut atau musim badai, lalu musim panceklik atau musim ikan yang mana mengakibatkan para nelayan kurang membawa hasil yang baik ke daratan sehingga nelayan merugi. Mahalnya harga-harga alat tangkap ikan seperti mesin, jaring, bahan bakar minyak dll, yang membuat para nelayan sering kekurangan modal dan harus meminjam kepada pemilik modal/rentenir dengan bunga yang cukup besar dan ketika pulang melaut nelayan harus menyisihkan uang untuk membayar persenan bunga hutang tersebut. Bisa disimpulkan bahwa program PUMP-PT belum efektif dalam meningkatkan pendapatan nelayan.

2. Kewirausahaan

Jiwa kewirausahaan akan sangat menentukan keberhasilan dalam kegiatan usaha baik dari sejak perencanaan, pelaksanaan, maupun evaluasi terhadap usaha yang dilakukannya. Seorang nelayan harus memiliki profil kewirausahaan dengan segala ciri-cirinya. Tidak hanya nelayan sebagian dari KUB dalam hal ini sebagai pengelola KUB dituntut untuk bisa memiliki kepemimpinan, tetapi yang lebih penting sikap mental wirausaha, manajemen dan keterampilan. Dilihat dari SDM nelayan yang mana dengan ketidakmampuan mengelola bantuan BLM dan kurangnya perputaran uang yang terjadi di KUB dan ketidakberlanjutan anggota KUB untuk melakukan aktivitas penangkapan ikan di karenakan kehabisan modal dan selalu merugi, indikator kewirausahaan dalam hal ini bisa dikatakan tidak efektif karena banyaknya kegagalan kelompok nelayan dalam mengelola KUB.

3. Kelembagaan KUB

Keberadaan KUB di bentuk setelah di sosialisasikan program PUMP-PT yang mensyaratkan sasaran penyaluran dana BLM yaitu nelayan-nelayan yang tergabung di KUB. Pembentukan KUB diharapkan mampu menyalurkan dan mengolah dana sebagai modal usaha nelayan, dengan demikian KUB merupakan mitra lembaga keuangan. Hal ini dapat dilihat juga dari SDM nelayan yang mana dengan ketidakmampuan mengelola bantuan BLM dan kurangnya perputaran uang yang terjadi di KUB dan ketidakberlanjutan anggota KUB untuk melakukan aktivitas penangkapan ikan di karenakan kehabisan modal dan selalu merugi,

indikator kelembagaan dalam hal ini bisa dikatakan tidak efektif karena banyaknya kegagalan masyarakat nelayan dalam mengelola kelembagaan KUB

A. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan hasil dan penelitian yang telah di uraikan pada bab-bab sebelumnya tentang Efektivitas Pengembangan Usaha Mina Pedesaan Bidang Perikanan Tangkap (PUMP-PT) Dalam Penanggulangan Kemiskinan bagi Masyarakat Nelayan di Kota Sibolga. Maka dapat di tarik kesimpulan sebagai berikut :

1. Pelaksanaan program Pengembangan Usaha Mina Pedesaan Bidang Perikanan Tangkap (PUMP-PT) Dalam Penanggulangan bagi Masyarakat Nelayan di Kota Sibolga dapat dikatakan masih belum efektif, hal tersebut dilihat dari manajemen pengurus KUB kurang berfungsi dan kegiatan pengolahan dana tidak mengikuti RUB, tidak berputarnya modal di KUB dengan baik, tenaga pembimbing tidak berfungsi dengan baik, kurangnya pengawasan pada saat setelah di salurkan nya BLM kepada anggota KUB. Setelah BLM tersalurkan dan menghasilkan infrastruktur penangkapan ikan yang masih digunakan sebagai aset bersama/KUB dan KUB di harapkan berfungsi sebagai lembaga ekonomi masyarakat nelayan dan ini tidak berjalan dengan baik.
2. Pencapaian Tujuan program Pengembangan Usaha Mina Pedesaan Bidang Perikanan Tangkap (PUMP-PT) Dalam Penanggulangan bagi Masyarakat Nelayan di Kota Sibolga dapat dikatakan masih belum efektif, hal tersebut dapat dilihat dari penyaluran dana BLM hanya mampu meningkatkan pendapatan dalam waktu jangka pendek saja dan tidak mampu menumbuhkembangkan kewirausahaan nelayan serta tidak mampu meningkatkan fungsi kelembagaan KUB sebagai mitra lembaga keuangan bagi nelayan.
3. Sesuai dengan misi Kementerian Kelautan dan Perikanan Tahun 2010-2014 yaitu “Mensejahterakan Masyarakat Kelautan dan Perikanan” program Pengembangan Usaha Mina Pedesaan Bidang Perikanan Tangkap (PUMP-PT) Dalam Penanggulangan Kemiskinan bagi Masyarakat Nelayan di Kota Sibolga dapat dikatakan tidak efektif karena semenjak Tahun 2014 program PUMP-PT di Kota Sibolga telah di hentikan oleh Pemerintahan Pusat dikarenakan ketidakmampuan KUB bertahan dalam usaha perikanannya yang mana bebagai macam hambatan-hambatan yang mempengaruhi efektivitas pelaksanaan program PUMP-PT. Faktor penghambat dalam pelaksanaan program PUMP adalah kondisi alam dan SDM masyarakat kota sibolga yang masih rendah.

DAFTAR PUSTAKA

Ahmad, Jamaluddin. 2015. *Metode Penelitian Administrasi Publik*. Yogyakarta: Gava Media.

Creswell, Jhon W. 2010. *Research Design Pendekatan kualitatif, kuantitatif, dan mixed*. Yogyakarta: Pustaka pelajar

Departemen Pendidikan dan Kebudayaan. 1989. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta: PT. Balai Pustaka.

Gie, The Liang. 2000. *Administrasi Perkantoran Modern*. Singapura: Pustaka Nasional ptc.Ltd.

_____. 2007. *Administrasi Perkantoran Modern: Edisi Keempat* Yogyakarta: Liberty.

Sumaryadi. I nyoman. 2005. *Efektivitas Implementasi Kebijakan Otonomi Daerah* Jakarta: Citra Utama

Sugiyono. 2011. *Metode Penelitian Administrasi*. Bandung: CV. Alfabeta.

Tangkilisan. 2007. *Efektivitas kerja dalam Proses administrasi*. Jakarta: Gramedia Erlangga.

Undang-Undang:

Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2010 Tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan.

Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 10 TAHUN 2014 Tentang Pedoman Pelaksanaan Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Kelautan dan Perikanan.